

**ANALISIS REALISASI BELANJA MODAL DAN BELANJA
PEMELIHARAAN PADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
KASUS DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ACEH BESAR)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH:

FAUZUL REZKI

NPM : 1602110169



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 01 Maret 2021

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FAUZUL REZKI
NPM : 1602110169

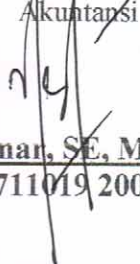
Dengan judul:

**ANALISIS REALISASI BELANJA MODAL DAN BELANJA
PEMELIHARAAN PADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN ACEH BESAR)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

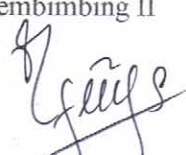
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK: 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Emmi Suryani Nst, SE, M.Si
NIK: 19800301 200610 2 001

Pembimbing II


Fitri Yunina, SE, M.Si
NIP: 19860610 201504 2 002

Mengetahui,
Dekan,

Drs. Taqiz Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 01 Maret 2021

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FAUZUL REZKI
NPM : 1602110169

Dengan judul:

**ANALISIS REALISASI BELANJA MODAL DAN BELANJA
PEMELIHARAAN PADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN ACEH BESAR)**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 04 Februari 2021

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak, CA
NIK: 19590217 199101 1 001

Anggota

Emmi Suryani Nst, SE, M.Si
NIK: 19800301 200610 2 001

Anggota

Fitri Yunina, SE, M.Si
NIP: 19860610 201504 2 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK: 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 01 Maret 2021

Yang Menyatakan



Fauzul Rezki

(Fauzul Rezki)

NPM: 1602110169

Lampiran Foto

DOKUMENTASI



Gambar. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Aceh Besar



Gambar. Penyerahan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
oleh Bapak Kasubbag Keuangan



Gambar. Penyerahan Profil Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar oleh Bapak Kasubbag Umum

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauzul Rezki
NPM : 1602110169
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS REALISASI BELANJA MODAL DAN BELANJA PEMELIHARAAN PADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BESAR)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Maret 2021

Banda Aceh, 01 Maret 2021
Yang Menyatakan,



Fauzul Rezki

(Fauzul Rezki)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Fauzul Rezki
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan/13 Januari 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Jln. T.Cut Ali, Desa Lhok Bengkuang, Kec.
Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan
9. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Syamsul Rizal, S.Pd
 - b. Ibu : Erfida, S.Pd
 - c. Pekerjaan : PNS
 - d. Alamat : Jln. T.Cut Ali, Desa Lhok Bengkuang, Kec.
Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 3 Tapaktuan, Tamat Tahun 2006
 - b. SMPN 1 Tapaktuan, Tamat Tahun 2009
 - c. MAN Unggul Tapaktuan, Tamat Tahun 2013
 - d. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
Masuk Tahun 2016 s/d sekarang.

Banda Aceh, 13 Januari 2021
Penulis,

Fauzul Rezki
NPM: 1602110169

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ya Allah, sebuah tantangan telah ku lewati, berikan aku kekuatan lagi untuk bisa melewati tantangan-tantangan berikutnya.

Amin ya Allah ...

*Tiada lain cita-cita dan keinginan ku
Selain membuat orang tua ku bangga dan tersenyum atas keberhasilan ku, begitu banyak hambatan dan cobaan yang kulalui dalam menyelesaikan TUGAS AKHIR ini aku berusaha dan terus berusaha walau terkadang hampir putus asa namun Ayahanda dan Ibunda selalu memberiku energi dan semangat baru untuk ku ...*

Ucapan syukur hanya kepada-Mu ya Allah engkau anugerahkan orang tua dan keluarga yang penuh kasih sayang dan pengertian hingga aku di izinkan mengecap dunia pendidikan, aku di bimbing dan dibina walau tidak dengan gelimang harta dan kemegahan dunia.

Ayahanda dan Ibunda ...

*Do'a kan Ananda semoga diberikan kekuatan untuk menyampaikan semua pengetahuan Ananda hingga berguna bagi agama nusa dan bangsa
Amin Yarabbal Alamin ...*

Karya tulis ini khusus ku persembahkan

Untuk Ayahanda Syamsul Rizal, S.Pd dan Ibunda Erfida, S.Pd yang telah banyak memberi do'a, dorongan dan semangat kepadaku.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Emi Suryani Nst, S.E, M.Si dan Ibu Fitri Yunina, S.E, M.Si. yang telah membimbing saya sehingga Tugas Akhir saya dapat selesai tepat pada waktunya.

Special ...

Untuk Shella Restiana, S.Pd yang telah memberikan motivasi dan yang selalu memberiku dukungan serta kasih sayang sehingga tercapai sudah apa yang ku impikan selama ini.

Terima kasih buat sahabat-sahabat ku ...

*Rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi angkatan 2016,
terimakasih buat semua kan ku ingat selalu akan jasa-jasanya.*

FAUZUL REZKI



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Tarmizi Gadeng, S.E, M.Si, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Hj. Nadiya, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Zulkifli Umar, S.E, M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Cut Fitria Syawalina, S.E, M.Si selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Emmi Suryani Nst, S.E, M.Si dan Fitri Yunina, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
6. Dosen, staf pengantar dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Ayahanda Syamsul Rizal, S.Pd, Ibunda Erfida, S.Pd, serta keluargaku yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.
8. Adinda Shella Restiana, S.Pd yang selalu memberikan dorongan semangat dan telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2016 yang telah memberikan saran-saran dan bantuan moral yang sangat membantu penulis.
10. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 13 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	9
2.1 Landasan Teoritis.....	9
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	12
2.1.3 Realisasi Anggaran.....	14
2.1.4 Analisis Belanja.....	16
2.1.5 Belanja Modal	19
2.1.6 Belanja Pemeliharaan	23
2.1.7 Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan.....	24
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian	33
3.1.1 Tujuan Penelitian.....	33
3.1.2 Jenis Penelitian	33
3.1.3 Horizon Waktu	34
3.1.4 Unit Analisis.....	34
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian	35
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	35
3.4 Teknik Analisis Data	37

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	44
4.3	Hasil Penelitian.....	47
4.3.1	Analisis Varians Belanja	48
4.3.2	Analisis Rasio Keserasian Belanja.....	49
4.3.3	Analisis Rasio Efektivitas Belanja	51
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
4.5	Implikasi Hasil Penelitian.....	55
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....		60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		63
LAMPIRAN-LAMPIRAN		64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2015 s.d 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar	5
2.1 Kriteria Efektivitas.....	19
2.2 Penelitian Sebelumnya	30
4.1 Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar	38
4.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar	39
4.3 Data Personal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar menurut Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin...	42
4.4 Data Personal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar menurut Status dan Pendidikan	43
4.5 Realisasi dan Anggaran Belanja Modal dari Tahun 2015 s.d 2019.....	45
4.6 Realisasi dan Anggaran Belanja Pemeliharaan dari Tahun 2015 s.d 2019 ..	45
4.7 Realisasi dan Anggaran Belanja Langsung dari Tahun 2015 s.d 2019	46
4.8 Realisasi dan Anggaran Belanja Tidak Langsung dari Tahun 2015 s.d 2019	46
4.9 Realisasi dan Anggaran Total Belanja dari Tahun 2015 s.d 2019.....	47
4.10 Hasil Perhitungan Analisis Varians Belanja Modal Tahun 2015 s.d 2019..	48
4.11 Hasil Perhitungan Analisis Varians Belanja Pemeliharaan Tahun 2015 s.d 2019.....	49
4.12 Rasio Belanja Langsung	50
4.13 Rasio Belanja Tidak Langsung	50
4.14 Rasio Efektivitas Belanja Modal	52
4.15 Rasio Efektivitas Belanja Pemeliharaan.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.....	64
2. Surat Izin Melakukan Penelitian	65
3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian	66
4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015	67
5. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016.....	70
6. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017	73
7. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	76
8. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	79
9. Foto Dokumentasi	82

**Analisis Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran
Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Aceh Besar)**

**FAUZUL REZKI
NPM : 1602110169**

Pembimbing I : Emmi Suryani Nst, SE, M.Si
Pembimbing II : Fitri Yunina, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 s.d 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer berupa laporan realisasi anggaran, dan teknik analisis datanya dilakukan secara deskriptif dengan perhitungan analisis varians belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efektivitas belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 s.d 2019 telah terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis varians belanja yang relatif baik di mana realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan dari tahun 2015 s.d 2019 tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Hasil analisis rasio keserasian belanja di mana besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah dialokasikan untuk belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan belanja langsung. Dan berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas belanja modal dan belanja pemeliharaan sudah dikategorikan efektif, namun pada tahun 2018 belanja modal dikategorikan cukup efektif, dan pada tahun 2015 belanja pemeliharaan dikategorikan tidak efektif.

Kata Kunci : Realisasi Anggaran, Realisasi Belanja Modal dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

***Analysis of Realization of Capital Expenditures and Maintenance
Expenditures in Local Government Budgets (Case Study at the Public
Works and Spatial Planning Office of the Aceh Besar District)***

**FAUZUL REZKI
NPM : 1602110169**

Adviser I : Emmi Suryani Nst, SE, M.Si
Adviser II : Fitri Yunina, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the realization of capital expenditures and maintenance expenditures in the regional government budget of the Public Works and Spatial Planning Office of Aceh Besar District 2015-2019. The method used in this research is descriptive qualitative, using primary data sources in the form of realization reports budget, and data analysis techniques are carried out descriptively by calculating the analysis of the variance of expenditures, expenditure balance ratios and spending effectiveness ratios. The results showed that the capital expenditure and maintenance expenditure of the Aceh Besar District Office of Public Works and Spatial Planning for 2015-2019 have been well realized. This can be seen from the results of a relatively good analysis of the variance of expenditures where the realization of capital expenditures and maintenance expenditures from 2015-2019 did not exceed the set budget. The results of the expenditure compatibility ratio analysis where the amount of funds owned by the Regional Government allocated for indirect expenditure is relatively small compared to direct expenditure. And based on the results of the ratio analysis of the effectiveness of capital expenditures and maintenance expenditures, it is categorized as effective, however in 2018 capital expenditures were categorized as quite effective, and in 2015 maintenance expenditures were categorized as ineffective.

***Keywords: Budget Realization, Capital Expenditure Realization and Maintenance
Expenditure Realization***

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara (Fikri, 2017 : 13).

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat melihat bagaimana peningkatan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, menandakan kegiatan ekonomi di negara tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif, menandakan kegiatan ekonomi di negara tersebut mengalami penurunan.

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Tidak ada yang memungkiri betapa pentingnya peranan infrastruktur dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan *output* ekonomi daerah tersebut (Hall, 2010: 23-26). Oleh karena itu, tiap daerah sekarang ini seolah-olah

berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Di Indonesia sendiri pembangunan infrastruktur mendapat perhatian khusus, sehingga dalam RPJM tahun 2010-2014 pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penyediaan, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimilikinya (Setiawan, 2014:1). Dalam melaksanakan pembangunan daerahnya suatu organisasi membutuhkan anggaran sektor publik yang baik, anggaran sektor publik yang ada di pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.” Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim,dkk 2012 : 230). Dengan analisis ini pemerintah dapat mengukur

efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dapat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah dan dapat membuat laporan keuangan sektor publik yang berbentuk laporan realisasi anggaran, baik itu anggaran belanja modal maupun belanja pemeliharaan yang dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan.

Halim (2012 : 73) menyatakan “Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada belanja administrasi umum yang dimaksud yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jaringan”.

Pengukuran belanja modal digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian efektivitas, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintahan tersebut (Mardiasmo, 2017 :121).

Syaiful (2010 : 4) menyatakan “Belanja pemeliharaan adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar

tetap dalam kondisi yang normal tanpa memperhatikan besar atau kecil aset tersebut”.

Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya dalam penghitungan biaya depresiasi aset tetap. Artinya, jika suatu aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun. Demikian pula, jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester (Fitriyati, 2012 : 22).

Secara teoritis belanja modal dan belanja pemeliharaan memiliki hubungan erat. Bagaimanapun belanja pemeliharaan hanya akan muncul bila ada “sesuatu” yang harus dipelihara dan “sesuatu” itu adalah aset tetap. Aset tetap ini biasanya muncul sebagai hasil dari terealisasinya belanja modal pada anggaran belanja pemerintah. Namun demikian, tidak semua aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah berasal dari realisasi APBN/APBD (Fitriyati, 2012 : 12).

Beberapa studi terkait dengan belanja modal dan belanja pemeliharaan yang telah dilakukan. Penelitian Sembiring (2010) mengemukakan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemeliharaan. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyati (2012) mengemukakan bahwa belanja modal dan belanja pemeliharaan memiliki hubungan yang kuat dan positif. Penelitian lain yang dilakukan oleh Asoka (2019) mengemukakan bahwa perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan laporan realisasi anggaran belanja modal dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap belanja modal dan belanja pemeliharaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar, diperoleh isu bahwa selama ini belanja modal dan belanja pemeliharaan belum terealisasi dikarenakan pemerintah masih belum mampu memberikan laporan realisasi anggaran secara terbuka.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara dengan staff karyawan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar, terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) realisasi anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan mengalami kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu 2015 s.d 2019, hal tersebut dalam dilihat pada tabel 1.1, dan (2) kurangnya efektivitas anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan.

Tabel 1.1

Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2015 s.d 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar

Tahun	Belanja Modal	Belanja Pemeliharaan
2015	94.438.579.000,00	564.455.000,00
2016	220.723.305.658,00	-
2017	113.995.977.800,00	907.323.915,00
2018	101.165.757.803,00	299.329.800,00
2019	124.665.625.647,00	996.095.900,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan permasalahan di atas, solusi yang dapat diambil agar terealisasinya anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan yaitu dengan cara mengumpulkan data anggaran dan realisasi belanja modal, data anggaran dan

realisasi belanja pemeliharaan, data anggaran dan realisasi belanja langsung, data anggaran dan realisasi belanja tidak langsung serta data anggaran dan realisasi total belanja yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar. Adapun rasio yang dipakai untuk menganalisis realisasi anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan yaitu varians belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efektivitas belanja.

Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat (2014 : 281) menyatakan bahwa analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Mahmudi (2010 : 30) mengemukakan bahwa analisis rasio keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Sedangkan Mardiasmo (2017 : 134) mengemukakan bahwa analisis rasio efektivitas digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Realisasi Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Penulis berharap manfaat dapat diterima bagi penulis sendiri, perusahaan dan ilmu pengetahuan (ilmu Ekonomi).

1. Bagi Akademis

Untuk memperoleh wawasan lebih luas terhadap perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang dengan topik yang sama.

2. Bagi Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik mengenai anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian, dimana penulis melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini berbentuk analisis data primer dan data sekunder. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar. Data diperoleh dari Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar. Data tersebut berupa laporan anggaran dan realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah tahun 2015 s.d 2019.

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data anggaran dan realisasi belanja modal pada anggaran pemerintah daerah tahun 2015 s.d 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.
2. Data anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah tahun 2015 s.d 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.
3. Data anggaran dan realisasi belanja langsung pada anggaran pemerintah daerah tahun 2015 s.d 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.
4. Data anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada anggaran pemerintah daerah tahun 2015 s.d 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.
5. Data anggaran dan realisasi total belanja pada anggaran pemerintah daerah tahun 2015 s.d 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).

Sektor publik akuntansi sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik.

Bastian (2010 : 3) mendefinisikan “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Sedangkan, Mardiasmo (2018 : 2) mendefinisikan “Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”.

Dari definisi-definisi di atas akuntansi sektor publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk masyarakat, sebagian besar merupakan organisasi pemerintah (*government*), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun sektor publik yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, LSM, partai politik, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu persediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik. Informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Menurut Mardiasmo (2018 : 2) tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi

pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Dilihat dari tujuan di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan suatu tindakan atau keputusan secara efisien yang dikelola oleh organisasi yang dipercayakan serta pelaporan pertanggungjawaban kepada publik atas hasil operasi atau dana publik yang telah digunakan.

Menurut Bastian (2010:7) elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik.

Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Perencanaan Publik
Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia saat ini.
- b. Penganggaran Publik
Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan walau wajar-wajar saja jika dikatakan pengelola/pengguna anggaran dan manajer publik secara bertahap dan sistematis.
- c. Realisasi Anggaran Publik
Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.
- d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pembiayaan. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa komponen laporan seperti Neraca, Laporan

Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan dilengkapi oleh Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Audit Sektor Publik

Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pengelola aset Negara lainnya. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi umum.

g. Pertanggungjawaban Publik

Pertanggungjawaban publik adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Halim (2012 : 10) menyatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD”.

Badrudin (2012 : 97) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomika Otonomi Daerah*, mengemukakan bahwa :

APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.” Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang memiliki beberapa unsur, seperti adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, sumber penerimaan, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunannya APBD dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/investasi.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2012: 22) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

2.1.3 Realisasi Anggaran

Menurut Prasetya (2010:6) dalam bukunya yang berjudul *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* menjelaskan: “Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan ”.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan terdiri dari:

1. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
2. Pendapatan (Basis Akrua) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
3. Belanja (Basis Kas) adalah Semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali ke Pemerintah.
4. Belanja (Basis Akrua) adalah Kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
6. Pembiayaan (*financing*) adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
7. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain itu Laporan Realisasi Anggaran ini juga disajikan 2 kali setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan disajikan dengan satu periode yang berubah lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. Anggaran alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.1.4 Analisis Belanja

Mahmudi (2016:154) Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah melakukan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Se jauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa :

1. Analisis Varians Belanja

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti (Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat, 2014 : 281).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan

realisasinya yang bisa dinyatakannya dalam nilai nominalnya atau presentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan dua jenis, yaitu: 1) selisih disukai (*favourable variance*), dan 2) selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*. Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis varians adalah :

- a. Mempertanyakan alasan terjadinya varians. Apakah selisih tersebut cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan?
- b. Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atau tidak?
- c. Berapa tingkat selisih (variens) yang bisa ditoleransi?

Sugeha, Figih Fez, dkk. (2013 : 5) dalam jurnalnya, menyatakan “Rumus yang digunakan untuk mencari varians belanja yaitu :”

$$\text{Analisis varians belanja} = \frac{\text{Selisih antara realisasi belanja dengan anggaran}}{\text{}}$$

2. Analisis Rasio Keserasian Belanja

Dalam Mahmudi (2010 : 30), analisis rasio keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan analisis keserasian belanja.

Sugeha, Figih Fez, dkk. (2013 : 5) dalam jurnalnya, menyatakan “Rumus yang digunakan untuk mencari analisis rasio keserasian belanja yaitu :”

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Belanja Tidak Langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan. Dilihat dari sudut pandang Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, Belanja Tidak Langsung dikategorikan sebagai biaya kebijakan (*discretionary expense/ expenditure*), sedangkan Belanja Langsung dikategorikan sebagai biaya teknik (*engineered expense/ expenditure*). Analisis proposi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan.

3. Analisis Efektivitas Belanja

Menurut Mardiasmo (2017 : 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Berikut untuk

mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% ke atas	Sangat efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup efektif
60% sampai 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri Tahun 1996 No. 690. 900. 327, Tahun 2016

2.1.5 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada belanja administrasi umum yang dimaksud yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jaringan (Halim, 2012 : 73).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 Ayat 3, mengemukakan bahwa “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”.

Syaiful (2010 : 4) dalam bukunya yang berjudul Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan, mengemukakan bahwa :

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013 : 121) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, mengemukakan bahwa :

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Munculnya aset tetap sebagai hasil dari terealisasinya anggaran belanja modal memiliki konsekuensi munculnya belanja pemeliharaan pada masa yang akan datang. Namun demikian, perlu diperhatikan karena ada beberapa belanja pemeliharaan yang memenuhi persyaratan sebagai belanja modal (Syarif, 2010:7), yaitu apabila (a) pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki dan (b)

pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan bagan akun standar, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap, atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas;
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual, tetapi digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari.

Dalam Buletin Teknis No. 4 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dikemukakan bahwa belanja modal meliputi belanja untuk memperoleh tanah; gedung dan bangunan; mesin dan peralatan; jalan, jembatan, dan irigasi; serta belanja modal fisik lainnya.

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian, penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah tersebut dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan dan penambahan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan pembangunan gedung, bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan, sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi

Belanja modal jalan, jembatan, dan irigasi adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penggantian, pembangunan, serta perawatan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembangunan, serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja yang masuk dalam kategori ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang

kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.1.6 Belanja Pemeliharaan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 46 Ayat 1, mengemukakan bahwa “Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik Negara/Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan dan berhasil guna”.

Belanja pemeliharaan adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam kondisi yang normal tanpa memperhatikan besar atau kecil aset tersebut (Syaiful, 2010 : 4).

Belanja pemeliharaan adalah belanja yang bersifat rutin yang terdapat pada semua satuan kerja atau pemerintah daerah yang memiliki aset, sehingga penentuan besarnya anggaran belanja pemeliharaan setiap tahunnya tergantung pada banyaknya aset yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Meskipun demikian, pada kenyataannya di lapangan pemerintah daerah tidak selalu mengalokasikan belanja pemeliharaannya berdasarkan aset tetap yang dimilikinya. Hal ini terlihat ketika dalam proses penyusunan APBD, banyak pemerintah daerah yang tidak melihat besaran nilai aset tetapnya sebagai dasar penentuan belanja pemeliharaan mereka. Bahkan ada

beberapa pemerintah daerah yang belum mempunyai neraca awal sebagai dasar pengalokasian belanja pemeliharaan.

Belanja pemeliharaan yang dikeluarkan yang tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat, dan atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan (Syaiful, 2010 : 5).

Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya dalam penghitungan biaya depresiasi aset tetap. Artinya, jika suatu aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun. Demikian pula, jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester (Fitriyati, 2012 : 22).

2.1.7 Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal. Hal ini berarti bahwa bila suatu daerah berencana untuk menganggarkan belanja modal pada anggaran belanjanya, pemerintah tersebut juga harus punya komitmen untuk menyediakan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi atas aset tetap yang diperolehnya dari belanja modal tersebut.

Belanja modal memiliki konsekuensi diperolehnya aset tetap (*fixed asset*) pada saat belanja tersebut direalisasi sepenuhnya atau *output*-nya sudah diperoleh. Hal ini bermakna adanya penambahan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Meskipun belanja modal dan belanja pemeliharaan dianggarkan dengan cara terpisah, bukan berarti bahwa belanja modal diproses tanpa melihat pengaruhnya terhadap penganggaran operasional. (Fitriyati, 2012 : 24)

Belanja modal dan belanja pemeliharaan memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan pelayanan kepada publik, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Keduanya relatif independen satu sama lain, termasuk dalam format dokumen anggarannya. Alokasi belanja modal biasanya didasarkan pada kebutuhan tiap satuan kerja dalam arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Pengalokasian belanja modal disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing satuan kerja. Ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobiler), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan. Sementara itu, satuan kerja yang lainnya hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. (Fitriyati, 2012:26)

Berbeda dengan belanja modal, belanja pemeliharaan terjadi pada semua satuan kerja atau unit organisasi pemerintah daerah, karena semua memiliki aset tetap dan bersifat rutin, belanja pemeliharaan tidak tergantung pada tupoksi satuan kerja, tetapi pada jumlah aset yang dimiliki.

Perbedaan lainnya adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Meskipun keduanya melibatkan negosiasi di antara eksekutif, bagian anggaran, dan pimpinan dinas, khusus untuk pengeluaran modal (khususnya untuk infrastruktur), mendapat masukan sangat besar dari insinyur, arsitek, dan perencana. Sumber pendanaan (*funding*) untuk kedua belanja juga berbeda. Belanja modal biasanya didasarkan pada *one-time sources*, seperti obligasi atau dari dana bantuan, sementara anggaran operasional umumnya berasal dari sumber pendapatan yang bersifat rutin, seperti pajak (*taxes*) dan retribusi (*service charges*). Perbedaan berikutnya adalah *time-frame* yang dimasukkan dalam setiap anggaran. Anggaran operasional biasanya hanya dianggarkan untuk satu tahun anggaran, sementara hampir semua belanja modal mengandung komitmen adanya pengeluaran dalam waktu melebihi satu tahun (Fitriyati, 2012 : 27).

Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, seperti belanja operasional dan pemeliharaan. Namun, tidak berarti belanja modal selalu sebagai penyebab atau *predictor* bagi kenaikan belanja operasional.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Hasil Penelitian Baihaqi dan Husnul Khotimah (2009) yang berjudul, “Hubungan Belanja Modal Dengan Belanja Pemeliharaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Di Wilayah Sumatera Bagian Selatan)”, menunjukkan bahwa nilai t-hitung masing-masing variabel yakni belanja modal dan belanja pemeliharaan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten tahun 2005 dan tahun 2006 (0,758; 0,518; 0,695; dan 0,843) lebih kecil daripada t-tabel 1,734. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2005 dan 2006 belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten se-sumbagsel tidak berbeda secara nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan uji statistik. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu menganalisis belanja modal dan belanja pemeliharaan. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu pada lokasi penelitian.
2. Hasil Penelitian Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat (2014) yang berjudul, “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung”, menunjukkan bahwa realisasi kinerja pendapatan daerah pemerintah kota Bitung dilihat dari sisi pendapatan dengan menggunakan analisis varians di tahun 2013 secara umum dapat dikatakan cukup baik dan terealisasi. Dan jika dilihat dari efektivitasnya realisasi kinerja keuangan pemerintah kota Bitung selama tahun 2013 berlangsung sangat efektif dengan

memberikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan prosedur yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu menganalisis realisasi anggaran. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis realisasi anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan.

3. Hasil Penelitian Anastasia Friska Palilingan, dkk (2015) yang berjudul, “Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado”, menunjukkan bahwa Kinerja belanja pemerintah Kota Manado dilihat dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Manado dapat dikatakan baik karena dari tahun 2009-2013 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya dari tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 90,75%. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu menganalisis realisasi anggaran belanja. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis realisasi anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan.
4. Hasil Penelitian Ni Wayan Ristiani, dkk (2015) yang berjudul, “Pengaruh Alokasi Belanja Modal Dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bangli Periode 2009-2013”, menunjukkan bahwa alokasi belanja modal secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Nilai probabilitas variabel belanja modal

yaitu $0.443 > 5\%$. Sedangkan, alokasi belanja pemeliharaan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Nilai probabilitas variabel belanja pemeliharaan yaitu $0.141 > 5\%$. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu menganalisis belanja modal dan belanja pemeliharaan. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu penulis tidak menganalisis alokasi belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap pendapatan asli daerah.

5. Hasil Penelitian Rano Asoka (2019) yang berjudul, “Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin”, menunjukkan bahwa perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun anggaran 2016 sampai tahun 2018 dapat dikatakan efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas dimana tahun 2016 sebesar 94,07%, tahun 2017 sebesar 92,75% dan tahun 2018 sebesar 88,29% tahun 2018 ini merupakan tahun anggaran terendah dari ketiga tahun tersebut, tetapi masih dalam kategori cukup efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu menganalisis realisasi anggaran belanja modal. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis realisasi anggaran belanja pemeliharaan.

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Sebelumnya

No.	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hubungan Belanja Modal Dengan Belanja Pemeliharaan Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota (Studi Kasus Di Wilayah Sumatera Bagian Selatan), Baihaqi dan Husnul Khotimah, (2009)	Metode deskriptif analisis dengan uji statistik	Pada tahun 2005 dan 2006 belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten se-sumbagsel tidak berbeda secara nyata.	Menganalisis belanja modal dan belanja pemeliharaan	Lokasi penelitian
2.	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung, Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat, (2014)	Metode kualitatif deksriptif	Dilihat dari sisi pendapatan analisis varians dapat dikatakan cukup baik dan terealisasi.	Menganalisis realisasi anggaran	Menganalisis realisasi anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan
3.	Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan	Metode analisis kualitatif deskriptif	Dilihat dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Manado dapat dikatakan baik	Menganalisis realisasi anggaran belanja	Menganalisis realisasi anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan

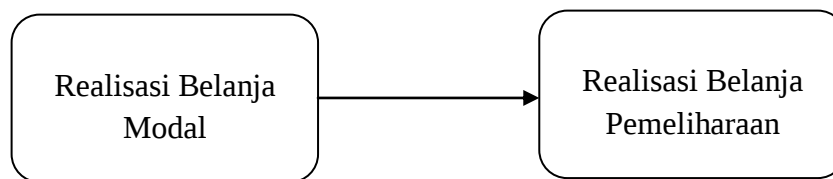
Tabel 2.2. Lanjutan

No.	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kota Manado, Anastasia Friska Palilingan, dkk, (2015)				
4.	Pengaruh Alokasi Belanja Modal Dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bangli Periode 2009-2013, Ni Wayan Ristiani, dkk, (2015)	Metode kuantitatif	Alokasi belanja modal dan belanja pemeliharaan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	Menganalisis belanja modal dan belanja pemeliharaan	Tidak menganalisis alokasi belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap pendapatan asli daerah.
5.	Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin, Rano Asoka, (2019)	Metode kualitatif deskriptif	Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan laporan realisasi anggaran belanja modal dapat dikatakan efektif	Menganalisis realisasi anggaran belanja modal	Menganalisis realisasi anggaran belanja pemeliharaan

Sumber : Data diolah (2020)

2.3 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2013 : 45) mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka sasaran yang ingin dicapai yaitu:



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun untuk mengetahui realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan dengan cara menganalisis varians belanja, rasio keserasian belanja dan efektivitas belanja. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah data belanja modal dan belanja pemeliharaan tahun 2015 s.d 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan cetak biru bagi pengumpulan, pengukuran, dan penganalisaan data. Desain penelitian menyatakan baik struktur masalah penelitian maupun rencana penelitian yang akan dipakai untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan-hubungan dalam masalah (Umar, 2011 : 35). Dalam penelitian ini, desain penelitian berisi tentang tujuan penelitian, jenis penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran pemerintah daerah.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011: 73) “Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-

satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi”.

3.1.3 Horizon Waktu

Penelitian deskriptif dibagi menjadi dua tipe berdasarkan rentang waktu (*time horizon*) yaitu studi *cross sectional* adalah tipe studi satu tahap yang datanya berupa subjek pada waktu tertentu. Sedangkan studi *time series* adalah tipe studi yang menekankan pada data penelitian berupa rentetan waktu (Ahmadi, 2014: 67).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan horizon waktu *time series* karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan dalam kurun waktu 5 tahun mulai dari 2015 s.d 2019.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan salah satu komponen dari penelitian kualitatif. Secara fundamental, unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian. Dalam studi kasus klasik, kasus mungkin bisa berkenaan dengan seseorang, sehingga perorangan merupakan kasus yang akan dikaji, dan individu tersebut unit analisis primernya (Yin, 2014:30).

Berdasarkan pengertian unit analisis di atas dapat disimpulkan bahwa unit analisis dalam penelitian ialah subjek yang akan diteliti kasusnya. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim, Kota Jantho. Yang menjadi objek dari penelitian ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah fakta atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagian besar tujuan dari penelitian adalah memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, penulis mencari data-data yang dibutuhkan yaitu berupa data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan merupakan data yang bisa diolah dan belum diolah oleh pihak lain. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang laporan realisasi anggaran belanja diantaranya anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dan merupakan data yang telah diolah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder secara landasan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam pembahasan penelitian kepustakaan dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan pada objek yang diteliti untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Data yang diperoleh penulis berupa:

- a. Pengamatan (*Observation*) yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat objektif dan sistematis.
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.
- c. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data yang ada dalam dokumen instansi.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana setelah data dikumpulkan, dianalisa dan diolah untuk memberikan gambaran dan uraian yang wajar mengenai keadaan objek penelitian. Dalam hal ini adalah semua yang berhubungan dengan realisasi anggaran diantaranya anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.

Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan dan dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Analisis varians belanja = Selisih antara realisasi belanja dengan anggaran
2. Analisis rasio keserasian belanja = Rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja

Rumus :

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

3. Analisis rasio efektivitas belanja

Rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh. Untuk tahun ini (2020) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar dipimpin oleh Bapak Syahrial Amanullah, ST. Dari tahun ke tahun Dinas ini terus mengalami perkembangan baik dari segi pembangunannya maupun dari segi infrastrukturnya. Keadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fasilitas yang cukup baik. Dimana lingkungannya begitu nyaman karena letak dan posisinya yang dekat dengan pegunungan dan banyak pohon-pohon rindang sehingga terasa lebih nyaman.

Tabel 4.1

Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar

Profil Kantor	
Nama Kantor	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar
Alamat Lengkap	: Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim
Kecamatan	: Kota Jantho
Kabupaten / Kota	: Aceh Besar
Provinsi	: Aceh
Nama Kepala Dinas	: Syahrial Amanullah, ST

Tabel 4.1. Lanjutan

Profil Kantor	
Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Pemerintah
Permanen / Semi Permanen	: Permanen
Luas Tanah Seluruhnya	: ± 15 hektar
Sumber : Dokumentasi, Sumber Data (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2020)	

1. Sarana dan Prasarana

Kondisi fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar meliputi keberadaan gedung kantor yaitu: Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris, Ruang Bendahara, Ruang Keuangan, Ruang Sub. Bagian Umum, Ruang Bidang, Ruang Kasubbag Program, Ruang E-billing, Lapangan, Mushalla, WC Umum, Gudang, Workshop/Bengkel, Ruang Penjaga Kantor, dan Parkiran, serta sarana/ media pendukung terdiri dari LCD/Proyektor, Laptop, Komputer, Printer, AC, Meja dan Kursi, berikut rinciannya:

Tabel 4.2

Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar

No.	Sarana dan Prasarana	Milik						Bukan Milik	
		Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat			
		Jml	Luas (m ²)	Jml	Luas (m ²)	Jml	Luas (m ²)	Jml	Luas (m ²)
1.	Ruang kepala dinas	1	48	-	-	-	-	-	-
2.	Ruang sekretaris dinas	1	25	-	-	-	-	-	-
3.	Ruang bendahara	1	35	-	-	-	-	-	-

Tabel 4.2. Lanjutan

No.	Sarana dan Prasarana	Milik						Bukan Milik	
		Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat			
		Jml	Luas (m ²)	Jml	Luas (m ²)	Jml	Luas (m ²)	Jml	Luas (m ²)
4.	Ruang keuangan	1	30	-	-	-	-	-	-
5.	Ruang sub. bagian umum	1	35	-	-	-	-	-	-
6.	Ruang bidang tata ruang dan bangunan	1	50	-	-	-	-	-	-
7.	Ruang bidang operasi dan pemeliharaan irigasi serta ruang komisi irigasi	1	48	-	-	-	-	-	-
8.	Ruang bidang irigasi, sungai, rawa dan pantai	1	48	-	-	-	-	-	-
9.	Ruang bidang binamarga	1	80	-	-	-	-	-	-
10.	Ruang bidang perencanaan binamarga, cipta karya dan SDA	1	100	-	-	-	-	-	-
11.	Ruang bidang cipta karya dan perumahan	1	80	-	-	-	-	-	-
12.	Ruang kasubbag program	1	25	-	-	-	-	-	-
13.	Ruang E-billing	1	25	-	-	-	-	-	-
14.	Ruang serbaguna/ aula	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 4.2. Lanjutan

No.	Sarana dan Prasarana	Milik						Bukan Milik	
		Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat			
		Jml	Luas (m ²)	Jml	Luas (m ²)	Jml	Luas (m ²)	Jml	Luas (m ²)
15.	Lapangan	1	200	-	-	-	-	-	-
16.	Mushalla	1	81	-	-	-	-	-	-
17.	Kantin	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	WC umum	3	12	-	-	-	-	-	-
19.	Gudang	3	105	-	-	-	-	-	-
20.	Workshop/ bengkel	1	120	-	-	-	-	-	-
21.	Rumah penjaga kantor	2	90	-	-	-	-	-	-
22.	Parkiran	1	30	-	-	-	-	-	-
Jumlah		25	1.267	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dokumentasi, Sumber Data (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2020)

2. Data Personal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar

Kepala Dinas, Pegawai Tetap, Staff/Karyawan, Tenaga Administrasi dan Pegawai Tidak Tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar berjumlah sebanyak 145 orang, yang tergolong berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin serta berdasarkan Status dan Pendidikan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Data Personal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh
 Besar menurut Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin

Jabatan	Status Kepegawaian										Jumlah	
	Tetap								Tidak Tetap			
	Gol.I		Gol.II		Gol.III		Gol.IV					
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Bendahara	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Kabid	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	6	-
Kasi	-	-	-	-	14	1	-	-	-	-	14	1
Kasubbag	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1
Pelaksana	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-
Staff	-	-	10	-	8	6	-	-	-	-	18	6
Pengawas	1	-	4	-	11	1	-	-	-	-	16	1
Tenaga Administrasi	-	-	4	3	7	1	-	-	7	10	18	14
Operator Komputer	-	-	2	1	2	1	-	-	3	3	7	5
Operator Mesin	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Operator Mesin Gilas	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-	7	-
Operator Alat Berat	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	4	-
Ajudan, Supir, Pengemudi	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5	-
Petugas Kebersihan	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	4	-

Tabel 4.3. Lanjutan

Jabatan	Status Kepegawaian										Jumlah	
	Tetap								Tidak Tetap			
	Gol.I		Gol.II		Gol.III		Gol.IV					
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Petugas Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Penjaga Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Personil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1
Jumlah	6	0	30	4	55	12	3	0	21	14	115	30
											145	

Sumber : Dokumentasi, Sumber Data (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2020)

Tabel 4.4

Data Personal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar menurut Status dan Pendidikan

Jabatan	Pendidikan							Jumlah
	SLTA	D.1	D.2	D.3	S.1	S.2	S.3	
Pegawai Tetap :								
Kepala Dinas	-	-	-	-	1	-	-	1
Sekretaris	-	-	-	-	1	-	-	1
Bendahara	-	-	-	-	2	-	-	2
Kabid	-	-	-	-	5	1	-	6
Kasi	1	-	-	-	14	-	-	15
Kasubbag	-	-	-	-	3	-	-	3

Tabel 4.4. Lanjutan

Jabatan	Pendidikan							Jumlah
	SLTA	D.1	D.2	D.3	S.1	S.2	S.3	
Pelaksana	2	-	-	-	2	-	-	4
Staff	11	-	-	2	11	-	-	24
Pengawas	10	-	-	-	7	-	-	17
Tenaga Administrasi	9	-	-	-	6	-	-	15
Operator Komputer	3	-	-	2	1	-	-	6
Operator Mesin	2	-	-	-	-	-	-	2
Operator Mesin Gilas	6	-	-	-	1	-	-	7
Operator Alat Berat	2	-	-	-	-	-	-	2
Ajudan, Supir, Pengemudi	3	-	-	-	-	-	-	3
Petugas Kebersihan	2	-	-	-	-	-	-	2
Pegawai tidak tetap	17	-	-	3	15	-	-	35
Jumlah	68	-	-	7	69	1	-	145

Sumber : Dokumentasi, Sumber Data (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2020)

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis deskripsi dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2015 s.d 2019 dengan objek penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar. Deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data realisasi dan anggaran belanja modal, serta data realisasi dan anggaran belanja pemeliharaan. Untuk mencari rasio keserasian belanja data yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi data realisasi dan anggaran belanja langsung, data realisasi dan anggaran belanja tidak langsung, serta data realisasi dan anggaran total belanja. Berikut tabel realisasi dan anggaran belanja modal, belanja pemeliharaan, belanja langsung, belanja tidak langsung dan total belanja dari tahun 2015 s.d 2019.

Tabel 4.5
Realisasi dan Anggaran Belanja Modal dari Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	97.189.806.091,00	94.438.579.000,00	97,17
2016	230.145.301.597,00	220.723.305.658,00	95,91
2017	123.183.808.200,00	113.995.977.800,00	92,54
2018	113.025.579.000,00	101.165.757.803,00	89,51
2019	129.991.417.469,00	124.665.625.647,00	95,90

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan dari tahun 2015 s.d 2019 realisasi anggaran belanja modal mengalami kenaikan dan penurunan. Pencapaian realisasi anggaran tertinggi terdapat pada tahun 2015 dengan tingkat realisasi sebesar 97,17%.

Tabel 4.6
Realisasi dan Anggaran Belanja Pemeliharaan dari Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	2.346.385.236,00	564.455.000,00	24,06
2016	-	-	-
2017	909.500.000,00	907.323.915,00	99,76
2018	300.000.000,00	299.329.800,00	99,78
2019	1.000.000.000,00	996.095.900,00	99,61

Ket : Pada tahun 2016 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak mengeluarkan anggaran untuk belanja pemeliharaan dikarenakan jalan, irigasi, jembatan dan gedung masih dalam kondisi yang normal.

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan dari tahun 2015 s.d 2019 realisasi anggaran belanja pemeliharaan mengalami kenaikan dan penurunan. Pencapaian realisasi anggaran belanja pemeliharaan tertinggi terdapat pada tahun 2018 dengan tingkat realisasi sebesar 99,78%

Tabel 4.7
Realisasi dan Anggaran Belanja Langsung dari Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	122.444.999.473,00	116.556.914.924,00	95,19
2016	255.849.061.097,00	244.672.966.027,00	95,63
2017	165.369.467.200,00	154.308.229.947,00	93,31
2018	145.965.819.000,00	132.809.734.817,00	90,99
2019	164.144.252.469,00	157.235.524.324,00	95,79

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan dari tahun 2015 s.d 2019 realisasi anggaran belanja langsung mengalami kenaikan dan penurunan. Pencapaian realisasi belanja langsung tertinggi terdapat pada tahun 2019 dengan tingkat realisasi sebesar 95,79%.

Tabel 4.8
Realisasi dan Anggaran Belanja Tidak Langsung dari Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	6.008.860.030,00	5.708.951.363,00	95,01
2016	6.664.386.158,00	5.861.088.234,00	87,95
2017	13.747.755.069,00	11.540.459.654,00	83,94
2018	14.568.002.790,00	11.899.190.519,00	81,68
2019	14.382.233.301,00	12.385.903.144,00	86,12

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan dari tahun 2015 s.d 2019 realisasi anggaran belanja tidak langsung mengalami kenaikan dan penurunan. Pencapaian realisasi belanja tidak langsung tertinggi terdapat pada tahun 2015 dengan tingkat realisasi sebesar 95,01%.

Tabel 4.9
Realisasi dan Anggaran Total Belanja dari Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	128.453.859.503,00	122.265.866.287,00	95,18
2016	262.513.447.255,00	250.534.054.261,00	95,44
2017	179.117.222.269,00	165.848.689.601,00	92,59
2018	160.533.821.790,00	144.708.925.336,00	90,14
2019	178.526.485.770,00	169.612.427.468,00	95,01

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan dari tahun 2015 s.d 2019 pada laporan realisasi anggaran total belanja mengalami kenaikan dan penurunan. Pencapaian realisasi anggaran total belanja tertinggi terdapat pada tahun 2016 dengan tingkat persentase 95,44%.

4.3 Hasil Penelitian

Pada penelitian ini data yang diperoleh yaitu data realisasi anggaran belanja modal, belanja pemeliharaan, belanja langsung, belanja tidak langsung dan total belanja. Data-data tersebut digunakan untuk menganalisis varians belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efektivitas belanja.

4.4.1 Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi dan anggaran. Perhitungan berikut menunjukkan varians anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan dari tahun 2015 s.d 2019.

Tabel 4.10
Hasil Perhitungan Analisis Varians Belanja Modal Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Modal (Rp)
2015	97.189.806.091,00	94.438.579.000,00	2.751.227.091,00
2016	230.145.301.597,00	220.723.305.658,00	9.421.995.939,00
2017	123.183.808.200,00	113.995.977.800,00	9.187.830.400,00
2018	113.025.579.000,00	101.165.757.803,00	11.859.825.197,00
2019	129.991.417.469,00	124.665.625.647,00	5.325.791.822,00

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians belanja modal dari tahun 2015 s.d 2019, selisih anggaran dan realisasi belanja modal terbesar terdapat pada tahun 2018 dengan nilai Rp 11.859.825.197,00. Hal ini mengidentifikasi bahwa realisasi belanja modal sebesar 89,51% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4.11
Hasil Perhitungan Analisis Varians Belanja Pemeliharaan
Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	Anggaran Belanja Pemeliharaan (Rp)	Realisasi Belanja Pemeliharaan (Rp)	Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan (Rp)
2015	2.346.385.236,00	564.455.000,00	1.781.930.236,00
2016	-	-	-
2017	909.500.000,00	907.323.915,00	2.176.085,00
2018	300.000.000,00	299.329.800,00	670.200,00
2019	1.000.000.000,00	996.095.900,00	3.904.100,00

Ket : Pada tahun 2016 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak mengeluarkan anggaran untuk belanja pemeliharaan dikarenakan jalan, irigasi, jembatan dan gedung masih dalam kondisi yang normal.

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians belanja pemeliharaan dari tahun 2015 s.d 2019, selisih anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan terbesar terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp 1.781.930.236,00. Hal ini mengidentifikasi bahwa penggunaan belanja pemeliharaan hanya sebesar 24,06 % dari anggaran belanja pemeliharaan yang telah ditetapkan.

4.4.2 Analisis Rasio Kesenjangan Belanja

Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Baik itu untuk belanja langsung maupun untuk belanja tidak langsung. Untuk mencari rasio keserasian belanja digunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.7, tabel 4.8 dan tabel 4.9, maka untuk mencari rasio keserasian belanja data yang digunakan adalah realisasi belanja langsung, belanja tidak langsung dan total belanja. Perhitungan rasio keserasian belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 4.12
Rasio Belanja Langsung

Tahun	Total Belanja Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	Persentase (%)
2015	116.556.914.924,00	122.265.866.287,00	95,33
2016	244.672.966.027,00	250.534.054.261,00	97,66
2017	154.308.229.947,00	165.848.689.601,00	93,04
2018	132.809.734.817,00	144.708.925.336,00	91,78
2019	157.235.524.324,00	169.612.427.468,00	92,70

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Tabel 4.13
Rasio Belanja Tidak Langsung

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	Persentase (%)
2015	5.708.951.363,00	122.265.866.287,00	4,67
2016	5.861.088.234,00	250.534.054.261,00	2,34
2017	11.540.459.654,00	165.848.689.601,00	6,96
2018	11.899.190.519,00	144.708.925.336,00	8,22
2019	12.385.903.144,00	169.612.427.468,00	7,30

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.12 dan tabel 4.13, dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 s.d 2019 sebagian besar dana dimiliki Pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan rasio belanja langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu 95,33%, 97,66%, 93,04%, 91,78%

dan 92,70%, sedangkan untuk belanja tidak langsung yaitu 4,67%, 2,34%, 6,96%, 8,22% dan 7,30%.

4.4.3 Analisis Rasio Efektivitas Belanja

Rasio efektivitas belanja digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya pencapaian tujuan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuannya. Apabila Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan maka Pemerintah Daerah tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja Pemerintah Daerah tersebut.

Dalam penelitian ini rasio efektivitas yang diukur adalah belanja modal dan belanja pemeliharaan. Untuk mengukur tingkat efektivitasnya digunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh tabel 4.4 dan tabel 4.5, maka untuk mencari rasio efektivitas belanja data yang digunakan adalah realisasi dan anggaran belanja modal, serta realisasi dan anggaran belanja pemeliharaan. Perhitungan rasio efektivitas belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 4.14
Rasio Efektivitas Belanja Modal

Tahun	Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	97.189.806.091,00	94.438.579.000,00	97,17	Efektif
2016	230.145.301.597,00	220.723.305.658,00	95,91	Efektif
2017	123.183.808.200,00	113.995.977.800,00	92,54	Efektif
2018	113.025.579.000,00	101.165.757.803,00	89,51	Cukup Efektif
2019	129.991.417.469,00	124.665.625.647,00	95,90	Efektif

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas belanja modal tertinggi terdapat pada tahun 2015 dengan nilai efektivitas sebesar 97,17%.

Tabel 4.15
Rasio Efektivitas Belanja Pemeliharaan

Tahun	Anggaran Belanja Pemeliharaan (Rp)	Realisasi Belanja Pemeliharaan (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	2.346.385.236,00	564.455.000,00	24,06	Tidak Efektif
2016	-	-	-	-
2017	909.500.000,00	907.323.915,00	99,76	Efektif
2018	300.000.000,00	299.329.800,00	99,78	Efektif
2019	1.000.000.000,00	996.095.900,00	99,61	Efektif

Ket : Pada tahun 2016 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak mengeluarkan anggaran untuk belanja pemeliharaan dikarenakan jalan, irigasi, jembatan dan gedung masih dalam kondisi yang normal.

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas belanja pemeliharaan tertinggi terdapat pada tahun 2018 dengan nilai efektivitas sebesar 99,78%.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan beberapa analisis rasio-rasio maka dapat diketahui bahwa perkembangan realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan dapat dikatakan relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian masing-masing rasio diantaranya analisis varians belanja modal dan belanja pemeliharaan dari tahun 2015 s.d 2019, di mana realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan atau yang direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian rasio keserasian belanja yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015 s.d 2019 sebagian besar dana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar dialokasikan untuk belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan rasio belanja langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu 95,33%, 97,66%, 93,04%, 91,78% dan 92,70%, sedangkan untuk belanja tidak langsung yaitu 4,67%, 2,34%, 6,96%, 8,22% dan 7,30%.

Berdasarkan hasil penelitian rasio efektivitas belanja modal pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019 dikategorikan efektif, namun pada tahun 2018 rasio efektivitas belanja modal dikategorikan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari perolehan persentase efektivitas belanja modal dari tahun 2015 s.d 2019 yaitu 97,17%, 95,91%, 92,54%, 89,51% dan 95,90%.

Hasil perhitungan rasio efektivitas belanja pemeliharaan pada tahun 2015 dikategorikan tidak efektif karena persentase yang diperoleh yaitu 2,41%. Pada tahun 2016 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak mengeluarkan anggaran

untuk belanja pemeliharaan dikarenakan jalan, irigasi, jembatan dan gedung masih dalam kondisi yang normal. Kemudian pada tahun 2017 s.d 2019 rasio efektivitas belanja pemeliharaan dikategorikan efektif. Hal ini dapat dilihat dari perolehan persentase efektivitasnya yaitu 99,76%, 99,78% dan 99,61%.

Semua hasil analisis data yang telah peneliti lakukan dengan menganalisis varians belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efektivitas belanja menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar telah terealisasi dengan baik. Hal ini mengidentifikasi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar telah mampu merealisasikan belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan. Realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat dan dapat dilihat dari perolehan persentase rasio efektivitas belanja, di mana hasil dari analisis keduanya dikatakan efektif.

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai belanja modal dan belanja pemeliharaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitriyati (2012) mengenai hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($3,748 \geq 0,05$), hal ini berarti bahwa hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan.

Hasil penelitian lain yang serupa dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Asoka (2019) mengenai efektivitas realisasi anggaran belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan

daerah selama tahun anggaran 2016 sampai Tahun 2018 dapat dikatakan efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas dimana Tahun 2016 sebesar 94,07%, Tahun 2017 sebesar 92,75% dan tahun 2018 sebesar 88,29% tahun 2018 ini merupakan tahun anggaran terendah dari ketiga tahun tersebut, tetapi masih dalam kategori cukup efektif.

Selanjutnya, Palilingan (2015) melakukan penelitian dengan kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil penelitian menunjukkan realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2009-2013 yaitu sebesar 92,57 %, 94,25 %, 94,03 %, 93,43 %, 79,50 %. Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung terlihat bahwa untuk tahun 2013 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja langsung sehingga rasio belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu sebesar 58,5 % sedangkan rasio belanja tidak langsung yaitu sebesar 41,4 %.

4.5 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia dan lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas serta keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu parameter yang sebaiknya dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah agar dapat memperoleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan hasil yang relatif baik. Selain itu juga diharapkan dengan

adanya penelitian ini, pihak-pihak yang bersangkutan dapat melihat lebih luas lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu Pemerintahan dan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi permasalahan tersebut.

Dapat dipastikan bahwa hasil dari penelitian ini memiliki implikasi yang positif bagi pihak Pemerintah Daerah. Dari berbagai macam permasalahan yang terjadi di ruang lingkup penelitian ini telah terungkap hasil-hasil penelitian yang secara langsung berimbas terhadap pihak Pemerintah Daerah. Salah satu diantaranya adalah ketika observasi awal realisasi anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan mengalami kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu 2015 s.d 2019. Hal ini mengisyaratkan kepada pihak Pemerintah Daerah perlu memiliki sistem yang lebih baik dalam mengeluarkan anggaran yang dibutuhkan.

Hal lain yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai analisis varians belanja memberikan implikasi yang relatif baik di mana realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan dari tahun 2015 s.d 2019 tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Sehingga hal ini harus tetap dilakukan setiap tahunnya agar realisasi dan anggaran yang dikeluarkan tetap menjadi lebih baik.

Implikasi yang lain diperoleh dari hasil penelitian mengenai analisis keserasian belanja dimana besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah dialokasikan untuk belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan belanja langsung. Oleh karena itu, pihak Pemerintah Daerah harus terus memperhatikan rasio keserasian belanja agar menjadi lebih baik.

Implikasi lainnya juga diperoleh dari hasil penelitian mengenai analisis efektivitas belanja di mana hasil pengujian analisis efektivitas belanja modal pada tahun 2018 dikategorikan cukup efektif, sedangkan pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019 dikategorikan efektif. Kemudian hasil pengujian analisis efektivitas belanja pemeliharaan pada tahun 2015 dikategorikan tidak efektif. Pada tahun 2016 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak mengeluarkan anggaran untuk belanja pemeliharaan dikarenakan jalan, irigasi, jembatan dan gedung masih dalam kondisi yang normal. Kemudian pada tahun 2017 s.d 2019 dikategorikan efektif. Sehingga hal ini harus diperhatikan oleh pihak Pemerintah Daerah agar rasio efektivitas belanja setiap tahunnya berjalan dengan efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal dan belanja pemeliharaan telah terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis varians belanja yang relatif baik di mana realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan dari tahun 2015 s.d 2019 tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Hasil analisis rasio keserasian belanja di mana besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah dialokasikan untuk belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan belanja langsung. Dan berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas belanja modal dan belanja pemeliharaan sudah dikategorikan efektif, namun pada tahun 2018 belanja modal dikategorikan cukup efektif, dan pada tahun 2015 belanja pemeliharaan dikategorikan tidak efektif, serta pada tahun 2016 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak mengeluarkan anggaran untuk belanja pemeliharaan dikarenakan jalan, irigasi, jembatan dan gedung masih dalam kondisi yang normal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar dapat menerapkan analisis varian belanja, rasio

keserasian belanja dan rasio efektivitas belanja agar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahunnya mengalami perkembangan dan relatif baik.

2. Diharapkan untuk penelitian dan studi selanjutnya agar dapat memperluas jangkauan dalam pengambilan data untuk wilayah yang dijadikan sebagai ruang lingkup penelitian.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ruslam (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (Cetakan Ke-1)*. Yogyakarta : AR-Ruzz Media.
- Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal : 278-288.
- Asoka, Rano (2019). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*. Vol.2 No.2, Juni 2019. Hal : 76-91.
- Badrudin, Rudy (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Baihaqi dan Husnul Khotimah (2009). Hubungan Belanja Modal Dengan Belanja Pemeliharaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Di Wilayah Sumatera Bagian Selatan). *JMK*. Vol.7 No.3, Maret 2009. Hal : 1-27.
- Bastian, Indra (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Erlina dan Rasdianto (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan : Brama Ardian.
- Fikri, Rijalul Ahmad (2017). *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri.
- Fitriyati (2012). *Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
- Halim, Abdul (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Bastian (2012). *Akuntansi Sektor Publik Edisi III*. Yogyakarta : Andi.
- Halim, dkk. (2012). *Pengelolaan Keuangan Negara*. Bulak Sumur : NPP STIM YKPN.
- Hall, David (2010). *Mengapa Kita Membutuhkan Belanja Publik*. PSIRU, University of Greenwich. <http://www.psiru.org>. Diakses 17 November 2020.
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan*

Ekonomi, Sosial, dan Politik. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahmudi (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Penerbit. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi.

Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

Palilingan, Anastasia Friska, dkk. (2015). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal : 17-25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Prasetya, Gege Edy (2010). *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Andi Publisher.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : Legalitas.

Ristiani, Ni Wayan, dkk. (2015). Pengaruh Alokasi Belanja Modal Dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bangli 2009-2013. *e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Vol. 03, No.01, Tahun 2015.

Sembiring, Sri Hayati (2010). *Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemeliharaan dalam Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.

Setiawan, Putu Rudi (2014). *Kajian Pustaka Keterkaitan Infrastruktur Publik dan Ekonomi*.

Sugeha, Figih Fez, dkk. (2013). *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013*. Hal : 1-9.

Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfa Beta.

- Sukmadinata, Nana Syaodih (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Syaiful (2010). *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*.
<http://ukdmupi.com/contact-us>. Diakses 7 Oktober 2020
- Umar, Husein (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yin, Robert K (2014). *Studi Kasus Desain dan Metode (Cetakan Ke-13)*. Jakarta : Rajawali Pers.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Per 31 DESEMBER 2016

Nomor Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi	Prognosis	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	489,000,000.00	143,337,500.00	(345,662,500.00)	29.31
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	489,000,000.00	143,337,500.00	(345,662,500.00)	29.31
4.1.2.32.	Retribusi Jasa Usaha	489,000,000.00	143,337,500.00	(345,662,500.00)	29.31
4.1.2.32.01.	Retribusi Sewa Alat Berat	489,000,000.00	143,337,500.00	(345,662,500.00)	29.31
	JUMLAH PENDAPATAN	489,000,000.00	143,337,500.00	(345,662,500.00)	29.31
	BELANJA DAERAH	262,513,447,255.00	250,534,054,261.00	11,979,392,994.00	95.44
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,664,386,158.00	5,861,088,234.00	803,297,924.00	87.95
5.1.1.	Belanja Pegawai	6,664,386,158.00	5,861,088,234.00	803,297,924.00	87.95
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5,842,536,158.00	5,189,988,234.00	652,547,924.00	88.83
5.1.1.01.001.	Gaji pokok PNS/uang representasi	4,513,170,487.00	4,087,490,040.00	425,680,447.00	90.57
5.1.1.01.002.	Tunjangan keluarga	550,047,812.00	430,988,001.00	119,059,811.00	78.35
5.1.1.01.003.	Tunjangan jabatan	449,050,000.00	369,990,000.00	79,060,000.00	82.39
5.1.1.01.006.	Tunjangan beras	275,485,680.00	271,430,160.00	4,055,520.00	98.53
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	54,719,770.00	30,029,954.00	24,689,816.00	54.88
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	62,409.00	60,079.00	2,330.00	96.27
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	797,400,000.00	671,100,000.00	126,300,000.00	84.16
5.1.1.02.005.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	797,400,000.00	671,100,000.00	126,300,000.00	84.16
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	24,450,000.00	-	24,450,000.00	-
5.1.1.06.001.	Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah	24,450,000.00	-	24,450,000.00	-
	BELANJA LANGSUNG	255,849,061,097.00	244,672,966,027.00	11,176,095,070.00	95.63
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	887,975,000.00	760,200,000.00	84,175,000.00	85.61
5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	352,300,000.00	274,850,000.00	77,450,000.00	78.02
5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	509,300,000.00	465,700,000.00	43,600,000.00	91.44
5.2.1.03.	Uang Lembur	26,375,000.00	19,650,000.00	6,725,000.00	74.50
5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	26,375,000.00	19,650,000.00	6,725,000.00	74.50
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24,815,784,500.00	23,189,460,369.00	1,150,025,131.00	93.45
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120,097,500.00	102,736,000.00	17,361,500.00	85.54
5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor	48,100,000.00	43,465,000.00	4,635,000.00	90.36
5.2.2.01.002.	Belanja Dokumen /Administrasi Tender	42,975,000.00	35,122,000.00	7,853,000.00	81.73
5.2.2.01.003.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (lampu pijar, Bateray kering)	3,147,500.00	2,944,000.00	203,500.00	93.53
5.2.2.01.004.	Belanja Perangko, material dan Benda Pos Lainnya	5,950,000.00	3,850,000.00	2,100,000.00	64.71
5.2.2.01.005.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4,925,000.00	4,850,000.00	75,000.00	98.48
5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-hari Besar/Kesenian)	15,000,000.00	12,505,000.00	2,495,000.00	83.37
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	142,530,000.00	97,711,628.00	44,818,372.00	68.56
5.2.2.03.001.	Belanja Telepon	37,200,000.00	37,197,574.00	2,426.00	99.99
5.2.2.03.002.	Belanja Air	12,000,000.00	6,773,944.00	5,226,056.00	56.45
5.2.2.03.003.	Belanja Listrik	49,800,000.00	28,522,310.00	21,277,690.00	57.27
5.2.2.03.009.	Belanja surat Kabar/Majalah	5,020,000.00	2,520,000.00	2,500,000.00	50.20
5.2.2.03.010.	Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor	22,360,000.00	6,847,800.00	15,512,200.00	30.63
5.2.2.03.011.	Belanja Publikasi	3,750,000.00	3,450,000.00	300,000.00	92.00
5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
5.2.2.03.016.	Belanja Jasa Pengamanan dan Kebersihan	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00

Nomor Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi	Prognosis	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	309,400,000.00	253,053,731.00	56,346,269.00	81.79
5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	95.00
5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	168,000,000.00	152,259,330.00	15,740,670.00	90.63
5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	128,000,000.00	92,500,301.00	35,499,699.00	72.27
5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12,400,000.00	7,344,100.00	5,055,900.00	59.23
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,675,000.00	27,992,000.00	2,683,000.00	91.25
5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	7,175,000.00	6,143,750.00	1,031,250.00	85.63
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	23,500,000.00	21,848,250.00	1,651,750.00	92.97
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30,000,000.00	16,000,000.00	14,000,000.00	53.33
5.2.2.08.001.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30,000,000.00	16,000,000.00	14,000,000.00	53.33
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	353,301,000.00	300,919,500.00	52,381,500.00	85.17
5.2.2.11.001.	Belanja Makanan dan Minuman Harian pegawai	339,651,000.00	294,342,500.00	45,308,500.00	86.66
5.2.2.11.002.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000.00	1,782,000.00	18,000.00	99.00
5.2.2.11.003.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9,750,000.00	4,795,000.00	4,955,000.00	49.18
5.2.2.11.004.	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas Beserta Pertengkapannya	69,600,000.00	68,960,000.00	640,000.00	99.08
5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	69,600,000.00	68,960,000.00	640,000.00	99.08
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	786,450,000.00	451,957,510.00	331,559,490.00	57.47
5.2.2.15.001.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	246,150,000.00	132,825,000.00	113,325,000.00	53.96
5.2.2.15.002.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	540,300,000.00	319,132,510.00	218,234,490.00	59.61
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	27,000,000.00	-	27,000,000.00	-
5.2.2.17.001.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-
5.2.2.17.002.	Belanja Sosialisasi	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1,365,000,000.00	911,548,000.00	482,569,000.00	66.78
5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1,365,000,000.00	911,548,000.00	482,569,000.00	64.65
5.2.2.22.	Belanja Barang /Jasa yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ke	21,581,731,000.00	20,958,582,000.00	120,666,000.00	97.11
5.2.2.22.001.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/	493,000,000.00	480,184,000.00	120,666,000.00	75.52
5.2.2.22.002.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang akan Diserahkan Kepada Pihak	21,088,731,000.00	20,478,398,000.00	610,333,000.00	97.11
5.2.3.	BELANJA MODAL	230,145,301,597.00	220,723,305,658.00	9,421,995,939.00	95.91
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	3,760,000,000.00	795,610,000.00	2,964,390,000.00	21.16
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	3,760,000,000.00	795,610,000.00	2,964,390,000.00	21.16
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00
5.2.3.24.029.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	18,000,000.00	17,850,000.00	150,000.00	99.17
5.2.3.28.008.	Belanja Modal Pengadaan AC	18,000,000.00	17,850,000.00	150,000.00	99.17
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24,000,000.00	23,500,000.00	500,000.00	97.92
5.2.3.29.001.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	20,000,000.00	19,900,000.00	100,000.00	99.50
5.2.3.29.010.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,000,000.00	3,600,000.00	400,000.00	90.00
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
5.2.3.30.003.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Pejabat	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00
5.2.3.30.007.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00
5.2.3.31.007.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00
5.2.3.48.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2,524,000,000.00	2,195,485,000.00	328,515,000.00	86.98
5.2.3.48.001.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1,474,000,000.00	1,331,165,000.00	142,835,000.00	90.31
5.2.3.48.010.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan	1,050,000,000.00	864,320,000.00	185,680,000.00	82.32
5.2.3.58.	Belanja Modal Pengadaan Jalan	175,480,591,200.00	170,461,022,658.00	5,019,568,542.00	97.14
5.2.3.58.003.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	157,466,362,000.00	153,501,006,758	3,965,355,242.00	97.48
5.2.3.58.004.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	18,014,229,200.00	16,960,015,900	1,054,213,300.00	93.40
5.2.3.59.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	40,699,412,925.00	39,902,406,000.00	797,006,925.00	98.04
5.2.3.59.003.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	40,699,412,925.00	39,902,406,000.00	797,006,925.00	98.04

Nomor Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi	Prognosis	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.68.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	2,366,348,000.00	2,148,648,000.00	217,700,000.00	90.80
5.2.3.68.002.	Belanja Modal Pengadaan Air Sumber/Mata Air	2,366,348,000.00	2,148,648,000.00	217,700,000.00	90.80
5.2.3.69.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	5,244,449,472.00	5,150,284,000.00	94,165,472.00	98.20
5.2.3.69.001.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	5,244,449,472.00	5,150,284,000.00	94,165,472.00	98.20
	JUMLAH	262,513,447,255.00	250,534,054,261.00	11,979,392,994.00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(262,024,447,255.00)	(250,390,716,761.00)	(12,325,055,494.00)	

Kota Jantho, 31 Desember 2016

Pengguna Anggaran/Barang,
Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
Kabupaten Aceh Besar



HAZARUL HAIRI, ST., MT
NIP. 19690601 200012 1 010



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS EKONOMI

(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAKS. 21023 - 34092
BANDA ACEH 23245

NOMOR : 2166/UM.M7.FE/B/2020
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian & Mohon diberikan Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Besar

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Aceh dengan ini menerangkan :

Nama : **Fauzul Rezki**
Nim : 1602110169
Jurusan : Akuntansi

Mahasiswa tersebut diatas agar diperkenankan mengadakan penelitian yang berjudul **"Analisis Realisasi Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2015-2019 (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar)"** guna memperlancar pembuatan Karya Tulis/Working Paper (Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 17 November 200

XDekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Hj. Nadiya, S.E., M.Si.

NIK. 19590107 199201 2 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAKS. 21023 - 34092
BANDA ACEH 23245

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH (UNMUHA)

Nomor:73/EKA/2020

tentang:

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unmuha



Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh setelah:

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian tugas akhir (skripsi) mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unmuha, perlu ditunjuk dosen pembimbing
b. bahwa mereka yang tercantum namanya dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk membimbing skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Surat Keputusan Mendikbud RI No.0250/0/1991 tentang pendirian Fakultas Ekonomi Unmuha,
3. Pedoman PP.Muhammadiyah No.02/PED/LO/B/2012, tentang PTM;
4. Keputusan Majelis DIKTI PP.Muhammadiyah No.178/KEP/13/D/2012.
5. Surat Keputusan Rektor Unmuha No.006/UM/M/ KEP/0/2019.
- Memperhatikan** : Keputusan rapat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Emmi Suryani Nst.,SE.,M.Si. | sebagai Pembimbing I |
| 2. Fitri Yunina.,SE.,M.Si | sebagai Pembimbing II |

Skripsi atas nama:

Nama : Fauzul Rezki

NPM : 1602110169

Prodi : Akuntansi.

Judul skripsi : Analisis Realisasi Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Anggaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar).

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dengan keluarnya keputusan ini dibebankan pada biaya ujian komprehensif Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh.

Pada tanggal : 13 Oktober 2020

Dekan,



Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Tembusan:

1. Rektor Unmuha;
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim Telp. (0651) 92141 Fax. (0651) 92579
KOTA JANTHO - 23918

Nomor : 070/91/2021
Lampiran : 1 (satu) eks
Sifat : -

Hal : **Selesai Melakukan Penelitian**

Kota Jantho, 21 Januari 2021
Kepada Yth;
Ketua Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah
Di
Banda Aceh

Dengan Hormat;

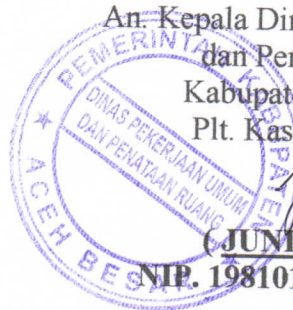
Bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Banda Aceh yang namanya tersebut di bawah ini;

Nama : Fauzul Rezki
Npm : 1602110169
Tempat Penelitian : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Aceh Besar

Telah selesai melakukan Penelitian (Wawancara) pada tanggal 21 Desember 2020 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Aceh Besar
Plt. Kasubbag Umum



(JUNTA, S. Sos)

NIP. 19810101 200801 2 001